

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian Makroekonomi Biodiesel

Faisal Basri dan Gatot A. Putra

Transisi energi untuk mengurangi penggunaan *fossil fuel* sejatinya berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kerangka kebijakan makroekonomi dan kebijakan publik yang *prudent*. Pilihan kebijakan untuk menyelesaikan satu masalah hendaknya tidak menimbulkan berbagai masalah baru dan menelan ongkos yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menghasilkan pilihan terbaik bagi perekonomian yang mengedepankan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi sumber energi angin, matahari, *hydropower* dan panas bumi cukup besar, namun hanya sebagian kecil yang sudah dimanfaatkan. Oleh karena itu, transisi energi sejatinya menekankan pada penggunaan energi alternatif yang menjawab tantangan jauh ke depan. Kebijakan harga memegang peranan sangat besar untuk mengoptimalkan segala potensi yang ada.

Kehadiran biofuel berbasis *crude palm oil* (CPO) hendaknya tidak sekedar sebagai bahan bakar alternatif, melainkan juga sekaligus menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh keberadaan subsidi BBM, seperti: beban anggaran, kebocoran, defisit transaksi perdagangan, dan aspek lingkungan.

Jika penerapan program B30 dan B40 dilakukan secara penuh, jutaan hektare lahan baru harus dibuka, padahal pertanian tanaman pangan juga membutuhkan tambahan lahan agar defisit perdagangan pangan bisa dikurangi dalam rangka meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan nasional.

Potensi masalah baru juga timbul karena *viability* produksi biodiesel sangat tergantung pada harga relatif CPO terhadap harga minyak bumi. Sementara *marginal cost* untuk memproduksi energi terbarukan pada umumnya cenderung turun, sedangkan harga relatif CPO cenderung tetap tinggi.

Kajian ini menganalisis dampak program biodiesel terhadap perekonomian yang meliputi aspek: perdagangan internasional, kebijakan fiskal, dan penggunaan lahan.

Kesimpulan

Program biodiesel menyebabkan neraca perdagangan defisit karena adanya kesempatan yang hilang berupa ekspor CPO dan ekspor biodiesel ditambah lagi peningkatan impor barang modal untuk pembangunan pabrik biodiesel baru karena kapasitas setelah tahun 2020 dipastikan perlu ditingkatkan. Selain itu peningkatan

impor juga akan berasal dari impor mesin yang digunakan untuk biodiesel beserta peralatannya karena mesin cenderung akan rusak jika menggunakan biodiesel.

Program biodiesel sulit untuk dapat meningkatkan surplus neraca perdagangan sekalipun jika biodiesel tersebut diekspor, mengingat di masa depan pasar Eropa dan Amerika Serikat justru mengurangi penggunaan biodiesel secara berarti dalam jumlah yang sangat besar. Artinya permintaan biodiesel dari negara-negara yang pendapatan perkapitanya tinggi justru mengalami penurunan dramatis. Selain itu tarif impor biodiesel dari Indonesia di Eropa dan Amerika Serikat dipastikan kena tarif yang lebih tinggi karena penerapan subsidi biodiesel.

Program biodiesel mengabaikan skala ekonomi yang paling efisien (natural monopoli) karena terkooptasi oleh kepentingan produsen CPO besar yang berupaya meningkatkan surplus produsen biodiesel melalui penerapan subsidi biodiesel. Pabrik biodiesel sebanyak 18 perusahaan untuk program B30 menghasilkan skala ekonomi yang sangat tidak efisien. Semakin besar kapasitas terpasangnya maka semakin besar surplus produsen yang akan diterima melalui program subsidi biodiesel.

Produsen biodiesel seharusnya tidak boleh memiliki pabrik CPO dan kebun sawit karena berpotensi melakukan *transfer pricing*, kartel, dan tidak efisien sehingga orientasi pabrik biodiesel harus difokuskan dalam meningkatkan daya saing (efisiensi) melalui skala ekonomi.

Subsidi biodiesel akan memberikan surplus bagi produsen biodiesel yang berpotensi untuk memberikan kesempatan bagi produsen biodiesel untuk memperluas lahan kelapa sawit karena program biodiesel sangat haus akan pemakaian lahan untuk penanaman kelapa sawit.

Penetapan harga biodiesel tidak dapat ditetapkan oleh pemerintah dengan formula yang menyebabkan harga biodiesel tidak pernah lebih murah dari harga CPO. Sementara harga CPO dalam jangka panjang besarnya enam kali harga biodiesel sehingga subsidi biodiesel dipastikan akan terjadi dalam jangka Panjang dan implikasinya harga biodiesel Indonesia tidak akan pernah kompetitif secara internasional. Pada gilirannya harus dipersiapkan dana subsidi jangka panjang dalam rangka yang sebetulnya memberikan keuntungan bagi produsen biodiesel. Dana dari pajak ekspor diperkirakan akan berkurang ketika harga minyak mentah secara relatif tidak mahal di masa depan. Implikasinya harga CPO akan sulit secara konsisten untuk berada pada rentang harga yang masuk dalam penerapan pajak ekspor.

Petani kelapa sawit dan/atau pemilik kebun kelapa sawit skala kecil akan sangat diuntungkan jika pajak ekspor dihapus dan subsidi biodiesel kepada produsen CPO juga dihapus. Penghapusan pajak ekspor CPO akan meningkatkan volume ekspor CPO dan harga jual CPO di dalam negeri, sementara penghapusan subsidi biodiesel membuka peluang agar dananya dapat dialokasikan untuk meningkatkan produktivitas petani kelapa sawit.
